



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD RIZA PATRIA
2. Jabatan : WAKIL MENTERI
3. NHK : 180198

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **14.768.800.000**

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , Rp. 6.850.000.000
3. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, Rp.
2.450.000.000
4. Tanah Seluas 2.344 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 468.800.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/123 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **465.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **707.250.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.475.989.001**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **1.800.000.000**

Sub Total **Rp.** **19.217.039.001**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 19.217.039.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.